



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3. NHK : 160302

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 885.296.000**

1. Tanah Seluas 375 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 1777 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI
Rp. 85.296.000
3. Tanah Seluas 1995 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 348 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 422 m2/300 m2 di POLEWALI
MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 233.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 81.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.790.165
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.229.586.165
III. HUTANG	Rp.	75.308.153
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.154.278.012

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.